

## **BAB IV**

### **KEHIDUPAN KEBUDAYAAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA PRESIDEN ABDURAHMAN WAHID**

#### **A. Kondisi Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Pada Era Pasca Reformasi**

Pada masa akhir Pemerintahan Orde Baru telah mengembalikan pada penggunaan istilah “Tionghoa” untuk menyebut nama orang-orang dari kalangan etnis Tionghoa. Istilah “Cina” atau “Cino” mulai dihapuskan. Ketika Presiden B.J. Habibie yang sudah meneruskan jabatan setelah masa kepemimpinan presiden Soeharto juga menggunakan sebutan orang Tionghoa dengan istilah “Tionghoa”. Padahal masa Presiden B.J.Habibie selama menjabat sebagai Wakil Presiden di era kepemimpinan Presiden Soeharto sering dianggap sebagai orang yang sangat anti Tionghoa.<sup>1</sup> Pada saat B.J.Habibie menjabat sebagai seorang Presiden, sangat tidak simpatik terhadap kalangan orang-orang dari etnis Tionghoa. Selain itu para aktivis Orde Baru yang sangat sadar terhadap akan makna istilah panggilan”Cina” sebagai panggilan orang-orang Tionghoa juga secara langsung mulai meninggalkan istilah panggilan “Cina” sebagai sapaan untuk kalangan orang Tionghoa.<sup>2</sup>

Pada tahun 1999, pendidikan Bahasa Mandarin di wilayah Pecinan Sidoarjo, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa tempat di berbagai jenis lembaga pendidikan yang ada di Kota Sidoarjo, terutama untuk sekolah khusus orang etnis

---

<sup>1</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 195.

<sup>2</sup> Leo Suryadinata, *Op. Cit*, hlm. 195.

Tionghoa mulai mengajukan izin untuk menyelenggarakan dalam mata pelajaran Bahasa Mandarin. Suatu perkembangan trend dalam Bahasa mandarin di masyarakat belum bisa dikatakan bahwa pendidikan orang-orang kalangan etnis Tionghoa belum bisa untuk kembali lagi. Pendidikan Bahasa Mandarin setelah masa Orde Baru lebih tepatnya dimasa Reformasi sudah bisa dilaksanakan di tempat-tempat kursus untuk Bahasa Mandarin.<sup>3</sup> Kemajuan dalam ber-Bahasa Mandarin setelah masa pemerintahan Orde Baru dikalangan Komunitas Tionghoa di sekitar Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo bukan karena suatu dorongan untuk mengembalikan hasil kebudayaan, namun karena dari sebuah faktor dorongan permintaan pasar yang sangat tinggi. Dalam dunia kerja mulai mencari seorang pegawai yang harus memiliki kecakapan dalam berbahasa Mandarin. Hal tersebut telah mengikuti kemunculan Negara Tiongkok sebagai Negara yang dengan perindustrian maju.

Pada masa Reformasi tahun 1999 sudah mulai ada keterbukaan antara pemerintahan terhadap keberadaan Kelenteng dan komunitas orang Tionghoa. Kemudian pada tahun 2000 dikeluarkan kepres No. 6 Tahun 2000 yang isinya menjelaskan tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 dan sudah diakuinya agama Kong Hu Cu sebagai agama yang resmi di Indonesia. Era Reformasi sangat memberikan pengaruh dalam sektor kebudayaan pada kelompok komunitas etnis Tionghoa yang ada di Kota Sidoarjo.<sup>4</sup> Kesenian Barongsai semenjak pemerintahan

---

<sup>3</sup> Chang Yau Hoon, *Op. Cit*, hlm. 77-79.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

awal Gus Dur sampai sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini kesenian Barongsai juga bisa diambil pelajaran untuk kalangan masyarakat Sidoarjo, dan tidak hanya orang-orang dari komunitas Tionghoa di Kota Sidoarjo.<sup>5</sup>

Di wilayah Pecinan, Kota Sidoarjo untuk dapat mempelajari kesenian Barongsai bisa dilakukan di Kelenteng Tjong hok kiong yang berada di jalan Hang Tuah No. 32 sangat berkembang pesat. Selain kesenian Barongsai yang sangat terkenal di komunitas Tionghoa di Kota Sidoarjo, kebudayaan Tionghoa sudah berbaur dengan masyarakat yang bernetabene umat beraga muslim di sekitar wilayah Kelenteng Tjong Hok Kiong.<sup>6</sup> Sedangkan untuk jenis kesenian Barongsai yang ada di Kota Siodarjo terbagi menjadi dua jenis singa, yaitu *Singa Utara* dan *Singa Selatan*. Singa Utara memiliki surai ikal, berkaki empat yang lebih natural, dan sangat mirip singa. Sedangkan Singa Selatan, yang bersisik dan jumlah kakinya sangat bervariasi, antara dua atau empat dengan kepala yang bertanduk. Gerakan Singa Utara dan Singa Selatan juga sangat berbeda. Singa Selatan dengan cara gerakan kepala yang sangat keras dan melonjak-lonjang. Sedangkan untuk gerakana Singa Utara sangat lebih lincah dan penuh dinamika karena mempunyai empat kaki.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Aprilianto Trenggono (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Danny ( 47 Tahun), Pengurus harian Kelenteng Tjong Hok kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

## **B. Kondisi Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Pada Masa Presiden Abdurahman Wahid**

Membahas tentang Tionghoa dan Pluralisme tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden yang bernama Abdurahman Wahid atau yang biasanya disapa Gus Dur. K.H. Abdurahman Wahid adalah merupakan salah satu tokoh publik yang sangat memiliki perhatian terhadap ide dan praktik demokrasi. Dengan sikap yang inklusif Gus Dur sangat berusaha memanusiaikan manusia dari segala bentuk macam diskriminasi didalam berbangsa dan bernegara dengan tidak melihat latar belakang asal usul, terutama kepada etnis yang disebut minoritas. Ditengah sikap Gus Dur yang sangat kontroversi, sangat menarik jika dianalisis pandangan-pandangan yang dimiliki oleh Gus Dur, salah satunya adalah Pluralisme agama didalam konteks keindonesiaan. Sikap toleransi/Pluralisme yang sudah dilakukan oleh Gus Dur sangat membuktikan bahwa sebenarnya sikap saling menghargai merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat beragama.

Pada saat Presiden Abdurahmah Wahid menduduki kursi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, Gus Dur menawarkan konsep bagi bangsa negara Indonesia yang anti-ras. Gus Dur menolak pembentukan suatu bangsa berdasarkan dalam satu pihak yang sebagaimana sudah tercermin dalam satu partai baru yang dibentuknya. Partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur juga sangat menyadari bahwa yang berada di Indonesia juga terdiri dari beberapa masyarakat yang sangat majemuk. Gus Dur juga menambahkan lebih lanjut bahwa Gus Dur menganggap dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia sebagai perkumpulan masyarakat orang dan bukan suku. Misalnya, dia berbicara tentang

orang Jawa(Suku Jawa), orang Maluku ( Suku Maluku), dan orang Tionghoa yang dimana semuanya adalah orang asli Indonesia.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai sikap Pluralisme<sup>8</sup> juga tidak terlepas dari peranan Presiden Abdurahman Wahid atau yang sering disapa dengan nama panggilan Gus Dur. Gus dur adalah salah satu tokoh yang sangat bertoleransi terhadap orang-orang Tionghoa. Dalam hal ini etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo juga memiliki hak-hak yang sama dalam sistem hukum dan pemerintahan karena etnis Tionghoa adalah bagian dari warga Kota Sidoarjo. Suatu gambaran perjalanan yang sangat panjang dimana etnis Tionghoa turut berperan dalam bidang kebudayaan serta penyebaran islam di nusantara ini.

Ali Masykur dalam bukunya yang berjudul, “*Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*”. Bahwa Gus Dur juga sangat dikenal dengan 9 hasil pemikirannya, yaitu: Ketahuidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Persaudaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Ksatria, dan kearifan lokal. Bahkan kalau menurut Mahfud MD, Gus Dur adalah salah satu tokoh humanis dan Pluralisme yang sangat berkelas didunia.<sup>9</sup> Sebagai salah satu tokoh nasionalis Gus Dur menerima asas tunggal pancasila. Dalam pandangan Gus Dur, meskipun Negara Pancasila tidak dengan secara tegas sebagai suatu negara agama bukan berarti negara pancasila tidak dibolehkan untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Idiologi

---

<sup>7</sup> Abdurahman Wahid, “Beri Jalan Orang Cina”, dalam *Nonpri Di Mata Pribumi*, ed. J. Jahja (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991), hlm. 224-228.

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 17.

<sup>9</sup> Aryanto Nugroho, *Jejak Langkah Guru Bangsa*,(Semarang: Ein Institute, 2010), hlm. 26.

pancasila sangat tidak berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari suatu agama. Terutama karena pancasila sangat menjamin hak setiap bagi pemeluk agama untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing.<sup>10</sup>

Dengan mengutamakan rasa Kecintaan, Kasih Sayang, Penghargaan yang Tulus kepada umat manusia, apapun jenis agama atau suatu keyakinan pada umumnya sama-sama menyembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya suatu ajaran saja yang berbeda sementara itu sebagai seorang tokoh Pluralisme dalam pandangan Gus Dur inilah yang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang Gus Dur sebagai seorang tokoh Pluralisme.<sup>11</sup>

Toleransi agama adalah sikap menghargai dengan pengakuan adanya kebebasan pada setiap manusia untuk memeluk agama dan menjaga keyakinan dan kebebasan dalam menjalankan syariat agamanya. Sikap saling menghargai harus bersikap kejujuran, besar hati, bijaksana, dan tanggung jawab, sehingga dapat menumbuhkan suatu bentuk perasaan solidaritas. Sikap saling menghargai terhadap berbeda agama bukanlah suatu campur aduk, melainkan dapat mewujudkan sikap tenang terhadap jiwa, saling menghargai bahkan sebenarnya lebih dari itu, antar pemeluk agama harus bisa saling membantu. Sikap saling bermusuhan, beprasangka tidak baik

---

<sup>10</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 101.

<sup>11</sup>Abdurahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, ( Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 202.

hatus dibuang jauh-jauh, diganti dengan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati pada setiap agama-agama lain.<sup>12</sup>

Ditengah kebijakan dari pemerintahan Gus Dur yang sangat kontroversi, ini sangat menarik jika kita mempratekkan pendapat-pendapat dari seorang Gus Dur tentang Pluralisme agama dalam konteks keindonesiaan. Dan juga, sebuah jaminan dasar akan suatu keselamatan dalam berkeyakinan agama bagi masing-masing warga masyarakat untuk melandasi sebuah hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling menghargai, saling menghormati, yang akan mendorong sikap penegertian yang sangat besar. Ini semua tidak bisa terlepas dari perjalanan sejarah dengan sikap penindas, dam zalim terhadap kelompok minoritas yang sangat berbeda keyakinan.<sup>13</sup>

Kelenteng dapat kembali untuk digunakan sebagai tempat beribadah bagi umat agama Konghucu. Etnis Tionghoa yang beragama Konghucu dapat lebih tenang dan hikmat dalam menjalankan ibadahnya didalam Kelenteng. Kelenteng dapat difungsikan sebagai Wihara pada tahun 1979. Namun kembali dialihfungsikan sebagai tempat ibadah bagi umat Konghucu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Seperti pada Kelenteng Tjong Hok Kiong yang beroperasi

---

<sup>12</sup>Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 153.

<sup>13</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kompolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007), hlm. 5.

sebagai tempat agama Konghucu pada tahun 2001 dan sebagai tempat pelaksanaan untuk Hari Raya Imlek.<sup>14</sup>

Kehidupan Pluralisme yang ada di Indonesia dapat bersanding bersamaan dengan sistem demokrasi, sikap Pluralisme mempunyai peran dalam menerima suatu perbedaan, memiliki sikap toleransi ataupun kesetaraan. Pluralisme tidak selamanya bisa diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, maka dari itu nilai-nilai dari Pluralistik bukan hanya suatu yang diberikan begitu saja oleh sebuah agama dan negara melainkan harus meliwati proses perjuangan. Memperjuangkan sikap Pluralisme diperlukan sebuah sikap yang sangat toleransi yang bisa ditanamkan pada kehidupan masyarakat, toleransi memiliki memiliki dua penafsiran. Pertama, penafsiran negatif menyatakan bahwa toleransi hanya bisa mensyaratkan cukup dengan dengan membiarkan dan menyakiti orang atau kelompoklain. Kedua, penafsiran positif menyatakan bahwa toleransi juga membutuhkan suatu bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang atau kelompoklain.<sup>15</sup>

Setelah dikeluarkannya hasil Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjuti pencabutan terhadap Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dengan mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2001 pada tanggal 9 April 2001 yang dimana Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasanya disapa oleh masyarakat dengan nama panggilan Gus Dur telah

---

<sup>14</sup> Ibad & Fikri, *Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia (Cetakan Kedua)*, (Yogyakarta: LKis Group, 2012), hlm. 107.

<sup>15</sup> Nawawi W, "Pluralisme Dalam Bingkai Islma dan Negara" dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3 No. 2, Tahun 2017*



meresmikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur yang bersifat fakultatif (hanya berlaku untuk masyarakat yang merayakan Tahun Baru tersebut) yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mau menghargai dari kepercayaan agama lain. Walaupun banyak sekali pihak yang menganggap keputusan Gus Dur sangat kontroversi, Gus Dur tidak akan membatalkan hasil keputusannya.

Pluralisme pada dasarnya sebuah kelanjutan dari sikap toleransi moral dan koeksistensi. Jika sikap toleransi adalah suatu kebiasaan saling menghargai suatu perbedaan yang sangat sekedarnya saja, sementara koeksistensi adalah sikap yang sangat menghargai keberadaan orang lain, tetapi tidak bisa memunculkan suatu permasalahan. Sementara itu Pluralisme adalah semangat untuk saling melindungi, mengakui kesamaan, dan menciptakan sikap rasa persaudaraan dari sesama umat manusia baik dari diri pribadi maupun dari suatu kelompok masyarakat. Disamping itu, semangat Pluralisme sangat mengedepankan sikap kerja sama dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat Universal, dan dapat memberikan suatu kesempatan terhadap pihak lain terutama dalam hak sipilnya atas nama warga bangsa, maupun dalam warga dunia.<sup>16</sup>

Dengan terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid sebagai seorang Presiden Republik Negara Indonesia pada masa pasca Reformasi merupakan salah satu angin segar bagi seluruh masyarakat dari kalangan orang-orang Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota Sidoarjo. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasanya

---

<sup>16</sup> Wibisono, M. Y, "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Islam" dalam *Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hlm. 12-24.*

disapa Gus Dur telah menjadi sosok yang sangat-sangat sentral pada masa kepemimpinannya karena telah menghapus larangan untuk kalangan etnis Tionghoa dari masa Orde Baru, dan menghidupkan kembali adat istiadat, serta kebudayaan dari kalangan orang etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota Sidoarjo.<sup>17</sup>

Presiden Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh pahlawan bagi kalangan etnis Tionghoa, karena beliau adalah salah satu orang pertama yang sangat berani dalam memberikan pengakuan terhadap kalangan orang Tionghoa dari segi kehidupan kebudayaan, agama, dan Tahun Baru Imlek yang selama ini telah dijalani oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia terutama di Kota Sidoarjo. Ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia Gus DUR mengeluarkan suatu kebijakan peraturan pemerintahan dengan mensahkan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia dan memperbolehkan orang-orang Tionghoa dalam merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek secara terbuka.<sup>18</sup>

Pada masa pemereintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasanya disapa Gus Dur, mulai memberikan angin segar bagi warga etnis Tionghoa di negara Indonesia. Gus Dur telah melakukan penghapusan terhadap satu Keputusan Presiden (Keppres) yang dimana melarang warga etnis Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek, bahkan secara simbolis Gus Dur ikut serta dalam perayaan Hari Raya Imlek bersama orang-orang Tionghoa setempat. Sebelum menjadi seorang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Trenggono aprilianto (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Trenggono Aprilianto (62 Tahun), sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022

Presiden, Gus Dur mencetuskan sebuah konsep untuk bangsa Indonesia yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari tiga ras, salah satu dari ras tersebut adalah ras Tionghoa, bahkan ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden, kebijakan anti diskriminasi menemukan suatu momentum yaitu dengan dikeluarkannya Inpres No. 6 Tahun 2000 yang isinya menjelaskan tentang pencabutan dari Inpres No 14 Tahun 1967 dimana menjelaskan tentang larangan menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama bagi kalangan orang-orang Tionghoa. Berbicara mengenai Pluralisme itu semua tidak terlepas dari pandangan seorang Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasanya disapa Gus Dur.<sup>19</sup>

Etnis Tionghoa dapat melaksanakan bentuk kebudayaan, dengan melakukan kegiatan tari Barongsai pada saat perayaan Hari Raya Imlek. Tarian Barongsai setelah vacuum selama 30 tahun dapat kembali ditarikan di Kelenteng Tjong Hok Kiong pada tahun 2000. Dimana bertujuan untuk mengenalkan tarian tersebut kepada masyarakat luas, kelompok penari Barongsai Liang Liong Dharma Bhakti Sidoarjo sering kali melakukan sebuah pagelaran Barongsai. ketika kelompok penari Barongsai mendapat undangan dalam memeriahkan event tidak mematok tarif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus harian kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022

### **C. Kondisi Kebudayaan Etnis Tionghoa di kota Sidoarjo di Bawah Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid**

Presiden Abdurrahman Wahid dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi seorang Presiden karena telah mengalahkan Megawati Soekarnoputri melalui hasil pemungutan suara. Sehingga dengan terpilihnya Gus Dur sebagai seorang Presiden dianggap yang sangat diuntungkan adalah kaum umat Kong Hu Cu. Dari saat itu umat Kong Hu Cu bisa mengekspresikan nilai-nilai dari hasil budaya dan keagamaan mereka kepada public masyarakat Indonesia. Dari hasil Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, Gus Dur mengatasi permasalahan diskriminasi etnis Tionghoa.

Bahkan sebelum Abdurrahman Wahid menjadi seorang presiden, Gus Dur melakukan pembelaan terhadap kalangan etnis Tionghoa. Diantarnya pembelaan terhadap etnis Tionghoa adalah berupa memberi jaminan keselamatan terhadap kalangan orang Tionghoa pada peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 1998 banyak sekali yang mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari pemerintahan, seperti toko dan rumah mereka dijarah sehingga menghasilkan korban jiwa yang sangat banyak. Sehingga menjadi penyebab banyaknya orang-orang Tionghoa yang melarikan diri ke luar negeri.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam menghapus sikap diskriminasi terhadap kalangan orang-orang tionghoa di

Indonesia tahun 1999-2000 sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari K.H. Abdurrahman Wahid yang sangat demokratis dalam pengamalan di kehidupan sosial di Indonesia. Hal ini dapat meliputi dari nilai-nilai yang sangat demokratis, yaitu sikap Pluralisme, kebebasan, keadilan, sikap persamaan. Presiden Abdurrahman Wahid mempunyai sebuah pemikiran bahwa demokrasi adalah hak untuk semua manusia, dan bukan kehendak dari kaum mayoritas. Demokrasi adalah sebuah esensi jika terdapat adanya berbagai golongan dan kelompok, besar maupun kecil, yang berbeda-beda akan bertentangan, yang berdasarkan antar suku, agama, keyakinan, etnis.<sup>21</sup> Kebijakan Presiden Abdurahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap kalangan orang-orang Tionghoa di Negara Indonesia pada tahun 2000 antara lain adalah dalam bidang kebudayaan, dan agama :

a. Dalam bidang Kebudayaan

Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid No. 6 Tahun 2000 menjadi sebuah peraturan yang sangat kompleks. Peraturan tersebut dapat memberikan kebebasan kepada orang-orang dari etnis Tionghoa dari bidang agama, adat-istiadat, budaya. Implementasi dari Keppres tersebut sangat menjadi legal kegiatan budaya etnis Tionghoa. Dengan adanya legalitas tersebut etnis Tionghoa dapat menjalankan pagelaran tari Barongsai seperti tradisi dari etnis lainnya. Seperti kelompok Barongsai Liang Liong Dharma Bakti Sidoarjo yang dapat aktif kembali pada tahun 2000.<sup>22</sup> sejak pertama kali diberlakukannya Keppres No. 6 Tahun 2000 yang isinya

---

<sup>21</sup> Effendi, W. I. *Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dan Implementasi Demokrasi di Indonesia*I, (Skripsi : Universitas Negeri Jember, 2012), hlm. 65.

<sup>22</sup> Majalah Intisari, *Etnik Tionghoa di Indonesia*, ( Jakarta: PT Intisari Mediatama, 2006), hlm. 33.

menjelaskan tentang kebebasan dalam menjalankan hasil budaya bagi kalangan orang-orang Tionghoa. Komunitas Tionghoa juga sering mendapatkan undangan untuk menampilkan tarian Barongsai pada acara pagelaran budaya, pernikahan sebagai iring-iringan pengantin, dan pada saat perayaan Hari Raya Imlek.

Momentum dalam perayaan Hari Raya Imlek yang ada di Kota Sidoarjo adalah hal yang sangat bahagia bagi kalangan orang dari etnis Tionghoa, karena bisa berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara dengan bersenda guarau dalam merayakan Hari Raya Imlek. Orang-orang dari etnis Tionghoa di sekitar wilayah Pecinan di Kota Sidoarjo sangat bisa merayakan kembali hari raya besarnya yaitu Hari Raya Imlek pada saat Presiden Abdurrahman Wahid telah menetapkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000. Untuk kebijakan selanjutnya telah dirumuskan oleh Menteri Agama sebagai Hari Raya yang bersifat Fakultatif melalui Keputusan Menteri Agama No. 13 Tahun 2001.<sup>23</sup> Hal tersebut dapat memuat bahwa perayaan Hari Raya Imlek hanya menjadi hari libur sehari bagi seluruh masyarakat komunitas etnis Tionghoa. Dengan demikian dapat terjadi suatu persamaan antara budaya etnis Tionghoa dengan etnis bangsa Indonesia lainnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, etnis Tionghoa bisa kembali menggunakan nama-nama yang asli dari bahasa Tionghoa. Penggunaan nama asli Tionghoa seperti Yusiu Liu sudah dapat digunakan sebagai nama asli. Etnis Tionghoa dengan sangat leluasa menggunakan nama yang beridentitas Tionghoa sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2000. Pada awalnya

---

<sup>23</sup> Afif, A. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Dri*, (Depok: Penerbit Kepik, 2012), hlm. 124.

penggunaan nama Tionghoa sangat dilarang keras oleh pemerintahan Orde Baru karena dapat menghambat proses terjadinya asimilasi bagi kalangan orang Tionghoa.<sup>24</sup> Namun pada perubahan peraturan menjadi sangat lebih demokratis setelah reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan memberikan kebebasan dalam penggunaan nama Tionghoa seperti Mona Lohanda, Yusiu Liu, Myra Sidharta, bisa kembali menggunakan nama Tionghoa.<sup>25</sup> Dengan demikian larangan terhadap penggunaan nama Tionghoa sudah berhenti dan sudah dapat menjadi persamaan derajat dalam menunjukkan identitas sosial.

Penetapan Hari Raya Imlek menjadi Hari Libur Nasional dapat menghilangkan perasaan bahwa asal, usul, ras, dan suku bangsa Indonesia sangat lebih terhormat dari suku yang lain. Keberagaman asal usul, ras, agama, adat istiadat, dan bahasa harus tetap dipegang teguh oleh semua masyarakat negara Indonesia. Karena dari keberagaman yang dapat diwujudkan dalam lambang negara tidak bisa hadir begitu saja akan tetapi dapat dibentuk dengan sebuah kesepakatan dan kebulatan berfikir dari tekad seluruh masyarakat Negara Indonesia. Hari Raya Tahun Baru Imlek (Shin Chia) bagi orang dari kalangan etnis Tionghoa adalah bagian dari hasil kebudayaan para leluhur dan bukan hanya sekedar dari hasil produk interaksi sosial tradisi turun temurun dalam masyarakat Tionghoa yang sangat kental dengan kepercayaan animisme dan pantheisme (penyembahan alam), maka tahun baru bukan hanya sekedar dari sebuah ritual tahunan, bulanan, dan secara budaya. Akan

---

<sup>24</sup> Greif, S. W. "*Wni*" *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Terjemahan Oleh A. Dahana, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 1991), hlm. 23.

<sup>25</sup> Afif, A. *Op. Cit*, hlm. 126.

tetapi hasil akulturasi kebudayaan yang menyatu dengan kepercayaan (agama) dimana percaya dengan roh-roh nenek moyang, makhluk halus, dan kehidupan sesudah mati (reinkarnasi) dan juga dapat disebut sebagai kebudayaan religi.

Perayaan Tahun Baru Imlek di Wilayah Pecinan, Sidoarjo, tidak bisa lepas dari atraksi tarian Barongsai, tarian ini adalah salah satu tradisi mengandung agama dan olahraga Kungfu. Barongsai sangat berkaitan dengan sebuah cerita legenda singa dan naga, makhluk yang datang dan meminta tumbal pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Untuk mengusirnya, maka telah diciptakan musik-musik yang terdiri dari tambur besar, gembengan, dan canang logam untuk mengiringi tarian Barongsai pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Untuk mengusir sial dilakukan dengan cara memberi *Ang Pau*, yaitu uang pemberian yang dilakukan pada saat perayaan Tahun Baru Imlek dengan kelipatan pemberian uang 4 seperti 400, 4.000, 8.000, dan seterusnya.

Dengan adanya perlindungan dari payung hukum untuk perayaan Hari Raya Imlek, berarti pula terbuka karena hasil keterbukaan bagi para WNI terutama keturunan Tionghoa di Kota Sidoarjo. Sehingga orang Tionghoa di Kota Sidoarjo tidak perlu ragu lagi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia yang telah membesarkan mereka, Indonesia. Hal ini juga berarti WNI keturunan Tionghoa memiliki kesetaraan dengan WNI lainnya pada umumnya. Dengan demikian bisa diharapkan, bagi warga WNI keturunan Tionghoa sekin mencintai



hingga sepenuh hati kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak segan-segan memberikan jasa dan karyanya untuk negeri yang tercinta<sup>26</sup>.

Menurut Bapak Danny, pengurus harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, dalam setiap persiapan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek maupun kegiatan Imlek, keberadaan kuliner dan jenis ornamen khas perayaan Imlek bukan tanpa suatu alasan. Semuanya memiliki nilai falsafah tersendiri. Misalnya, tradisi bersih-bersih rumah sejak satu minggu sebelum perayaan Imlek dilaksanakan, kegiatan bersih-bersih rumah tersebut ditujukan untuk menyambut kedatangan para dewa, seperti dewa rezeki dan dewa dapur. Warga Tionghoa di Kota Sidoarjo mengoleskan madu pada mulut patung dewa dapur, yang dimana bertujuan agar pada dewa yang datang ke dapur akan menyampaikan berita yang baik. Namun uniknya saat perayaan Imlek datang, warga Tionghoa dilarang untuk menyapu, karena menyapu pada saat perayaan Imlek akan membuat rezeki yang telah masuk ke dalam rumah menjadi hilang. Sedangkan dalam hal kuliner, Kue Keranjang merupakan salah satu jenis makanan wajib pada perayaan Imlek, karena pada saat merayakan Tahun Baru dengan makanan manis sangat dipercaya sebagai pertanda baik menjalankan kehidupan sehari-hari kedepannya. Selanjutnya makanan khas pada saat perayaan Imlek lainnya adalah Ikan Bandeng. Orang Tionghoa sangat percaya ikan adalah salah satu simbol rezeki, sehingga mengosumsi ikan bandeng

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022.

dapat diharapkan dapat mendatangkan rezeki yang sangat berlimpah di tahun depan.<sup>27</sup>

b. Dalam Bidang Agama

Konghucu adalah salah satu agama yang berasal dari daratan Tiongkok yang dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari etnis Tionghoa yang pertama kali datang ke nusantara. Dahulu nama nusantara adalah nama sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia yang sekarang ini. Sangat tidak mudah agama Konghucu bisa diakui sebagai agama yang sangat resmi dan diakui oleh pemerintah Indonesia, justru banyak sekali lika-liku rintangan yang harus dilalui sehingga bisa menjadi sebuah agama yang sudah bisa diakui seperti sekarang ini. Agama Konghucu dari masa ke masa mengalami sebuah ketidakstabilan dari beberapa kebijakan peraturan pemerintahan dari mulai jaman penjajahan, hingga masa Orde Baru, akan tetapi ketika pada masa Orde Lama agama Konghucu sempat diakui. Sedangkan memasuki masa Reformasi, agama Konghucu mendapatkan pengakuan secara resmi untuk menjadi salah satu agama resmi.<sup>28</sup>

Salah satu bentuk perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ialah dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih tepatnya dalam hal tentang perlindungan terhadap kebebasan dalam beragama yang sebenarnya sudah ada di

---

<sup>27</sup> Hartiningsing, Retnaningsih, *Op. Cit*, hlm. 10.

<sup>28</sup> W. George Skinner, "The Minority", in *Indonesia*, ed. Ruth Mc Vey (New Haven: Human Relations Area File Press, 1963), hlm. 97-117

dalam isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948. Artikel itu menyebutkan sebagai berikut:

*“..... Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti nama atau kepercayaan, dan kebebasan menjalankan kepercayaan dan agama dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan. Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi”.*

Dalam kutipan diatas, dapat menunjukkan sangat relevan bahwa dengan kebebasan setiap orang mempunyai hak untuk berekspresi dalam setiap aktivitas keagamaan. Hal ini dapat bertujuan agar tidak adanya salah satu pihak yang merasakan akan terdiskriminasi. Kerukukan dalam antar agama bukan hanya berdampingan secara damai tetapi dengan adanya saling mengerti satu sama lain. Berbicara yang perlu untuk dikembangkan adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti anantara semua pihak dan kelompok.

Hal ini juga dapat diperkuat oleh dicabutnya surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 Tahun 1978, dengan adanya dicabutnya kebijakan tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi larangan bagi umat agama Konghucu yang ada di sekitar pemukiman Pecinan di Kota Sidoarjo, termasuk untuk ingin mencatatkan dirinya dalam sebuah pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan untuk para murid-murid dari keturunan orang Tionghoa Di Kota Sidoarjo tidak perlu lagi lagi meminta izin atau membolos saat sekolah pada saat perayaan Hari Raya Imlek karena Gus Dur telah menetapkan Hari Raya

Imlek sebagai hari libur yang fakultatif yaitu hari libur yang ditujukan bagi orang yang merayakannya.<sup>29</sup>

Mengenai sebuah suatu kepercayaan bisa dikatakan sebuah agama bahwa manakala itu diyakini oleh para pemeluk-pemeluknya, tanpa pengakuan Negara agama itu akan tetap akan bisa tetap hidup karena adanya jiwa yang sudah tertanam dalam hati setiap insan manusia itu sendiri. Untuk menetapkan sesuatu seperti apakah agama betul-betul agama atau bukan, bukan suatu urusan pemerintah atau Negara. Tidak hanya itu, mengakui itu saja sudah merupakan sebuah kekeliruan. Jika pemerintah berbuat yang sangat demikian, artinya pemerintah juga sangat berbuat salah.

Selain itu orang-orang Tionghoa di Kota Sidoarjo mulai membentuk suatu organisasi yang pada masa Orde Baru sudah lama tidak aktif. Diantara organisasi yang pertama kali di wilayah Pecinan Kota Sidoarjo menyuarakan kembali eksistensi diri dari sebuah organisasi adalah organisasi agama. Yakni, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) dimana organisasi ini telah berdiri sekitar pada tahun 1967. Organisasi ini adalah organisasi yang pertama kali bangkit dan mengadakan kongres pada tahun 1998. Dari kongres inilah menjadi salah satu pemicu dari kebangkitan organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Kota Sidoarjo khususnya wilayah Pecinan di Jl Gajah Mada.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Damien Demantra, *Sejuta Hati Untuk Gus Dur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 264

<sup>30</sup> I. dan Thang Ju Lan Wibowo, *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 I*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 61.

Kebijakan yang sudah disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sangat bagus sekali karena telah disahkannya kebijakan ini oleh Gus Dur maka masyarakat sekitar di Daerah Sidoarjo dapat mengetahui kebudayaan dari orang-orang Tionghoa yang ada di Kampung Pecinan Sidoarjo, yang sebelumnya kita tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mengerti. Oleh karena itu, jika terdapat seseorang yang masih memiliki sikap sentimen terhadap kalangan orang dari etnis Tionghoa, maka pemikiran orang tersebut masih harus dipertanyakan. Karena dengan hasil kebijakan ini sudah tidak ada kaitannya.

Oleh karena itu, kehidupan beragama sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seluruh umat beragama yang ada di negara Indonesia seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha serta tidak ketinggalan adalah agama Konghucu. Agama Konghucu adalah salah satu agama di Indonesia yang mempunyai penganut agama yang berjumlah sangat banyak, seperti di pulau Sumatra sampai di pulau Papua, dari Kota hingga ke pelosok Nusantara, tidak pula ketinggalan di Kota Sidoarjo juga sangat banyak umat beragama Konghucu yang tersebar di Desa Klumpuk, tepatnya di Jl. Gajah Mada dan Kelenteng Tjong Hok Kiong sebagai pusat keagamaan dari Komunitas Tionghoa yang di Kota Sidoarjo. Akan tetapi, jumlah dari seluruh umat Konghucu secara pasti belum bisa di hitung berdasarkan data statistika kependudukan karena kedudukan identitas mereka (KTP) masih tertulis agama lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmat, Yulianto, "Eksistensi Konghucu di Indonesi: Studi Kasus di Kelenteng Boen Bio Surabaya", dalam AL-HIKMAH : *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. Hlm. 51.

#### **D. Dampak Peraturan Presiden Abdurrahman Wahid Terhadap Kebudayaan Tionghoa Di Kota Sidoarjo**

Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2000 telah melahirkan suatu kebebasan untuk etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo dalam menjalankan segala ritual agama, adat-istiadat, dan menerapkan hasil kebudayaannya di negara Indonesia. pasca pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1967, dari berbagai jenis hasil penerapan budaya mulai berkembang di Indonesia. Penerapan budaya etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo ditandai dengan maraknya seni tari Barongsai, Naga Liong, dan kebudayaan lainnya yang di masa Orde Baru dapat dipertontonkan hanya di dalam lingkungan keluarga saja.

Dalam bidang agama, agama Konghucu yaitu agama orang-orang Tionghoa di Kota Sidoarjo pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara bebas dan kegiatan keagamaan etnis Tionghoa mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara resmi oleh negara.<sup>32</sup> Tidak pula ketinggalan ketika merayakan hari raya Tahun Baru imlek etnis Tionghoa juga mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan. Khususnya di lingkungan Kelenteng Tjong Hok Kiong yang ada di Desa Sidoklumpuk, tepatnya di daerah Jl. Gajah Mada.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Trenggono Aprilianto (62 Tahun), Sekretaris Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022

Implikasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam hasil kebudayaan etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo yang lainnya adalah mengenai Hari Raya Imlek. Pada masa setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari kursi jabatan Presiden pada tahun 2001. Tepatnya masa jabatan kursi Presiden yang dijabat oleh Megawati, telah menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagai hasil untuk menindaklanjuti hasil kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Bentuk lain dari hasil implikasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai kebudayaan etnis Tionghoa ialah penetapan kembali Kelenteng sebagai tempat peribadatan etnis Tionghoa. Dimana pada saat itu, etnis Tionghoa diperbolehkan kembali menggunakan kelenteng sebagai tempat ibadah bagi pemeluk yang beragama Konghucu agar bisa beribadah secara tenang dan hikmat tanpa adanya gangguan manapun. Pada mulanya Kelenteng sudah dialihfungsikan sebagai Wihara pada tahun 1979. Akan tetapi pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, Kelenteng Tjong Hok Kiong menjadi salah satu tempat beribadah dengan tiga aliran antara lain Konghucu, Tao, dan Budha.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Danny (47 Tahun), Pengurus harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, 27 Oktober 2022